

BAB IV

DAMPAK RESOLUSI JIHADNAHDLATUL ULAMA (NU)

A. Dampak terhadap Kedaulatan NKRI

Motif kebangsaan jelas sangat tampak dalam pendirian Nahdlatul Ulama (NU), hal ini bisa kita lihat bagaimana KH. Hasyim Asy'ari menfatwakan keharaman menyerupai orang kafir (penjajah Belanda) dalam berpakaian, dan para era Jepang, ia juga pernah ditangkap dan dipenjarakan atas fatwanya mengharamkan *Shaikere* (kewajiban membungkukan badan menghadap ke arah timur demi menghormati kaisar Jepang sebagai titisan dewa matahari). Semua itu, merupakan contoh bagaimana KH. Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama pesantren berperan menanamkan jiwa kebangsaan dan patriotik mengusir penjajah dari negeri ini menurut KH. Hasyim Asy'ari, umat Islam tidak dapat menjalankan agamanya secara leluasa dalam negeri jajahan.¹

Resolusi Jihad NU sejatinya adalah salah satu bukti bahwa umat Islam Indonesia selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia (NKRI). Tanpa adanya resolusi jihad NU ini, mungkin Indonesia masih terjajah oleh Belanda yang saat itu ingin kembali menguasai

¹ Muhibbin Zuhri "NU lahir dari kota" <http://nusurabaya.or.id/2016/10/21/kh-m-hasyim-asyari-fatwa-jihad-dan-perjuangan-kemerdekaan/> (diakses pada 15 September 2017)

Indonesia. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Oktober 1945 ialah bertujuan untuk menyerukan perlawanan terhadap Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia setelah sekutu sukses mengalahkan Jepang dalam perang dunia II. Resolusi Jihad NU ini jelas dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masa Revolusi Indonesia, yang dimulai pada tahun 1945 merupakan momentum penting yang menjadi awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat secara politik. Dalam sejarah tercatat banyak berbagai perlawanan yang terjadi hampir di semua kota penting di Jawa untuk mempertahankan kedaulatan negara. Gerakan perlawanan itu pastilah di dorong oleh nilai-nilai yang membangkitkan keberanian untuk melakukan pengorbanan jiwa, raga dan harta. Fatwa jihad yang dikeluarkan NU diyakini memiliki kontribusi yang nyata dalam mengkristalkan semangat nasionalisme. Hal ini karena NU memiliki basis kekuatan yang besar di Jawa, sehingga fatwa tersebut dapat memobilisir kekuatan tempur masyarakat muslim.

Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya kongres umat Islam yang menyatakan perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan. Diantaranya ialah Kongres umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7-8 Nopember 1945 yang mengeluarkan putusan yang memberikan penguatan terhadap seruan resolusi jihad NU yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945.²

²Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad, Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agama dan Negara* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), p.182.

Kongres umat Islam yang diadakan di Yogyakarta itu menegaskan bahwa setiap bentuk penjajahan adalah sebuah kezholiman yang melanggar prinsip kemanusiaan dan jelas haram dalam Islam serta wajib bagi setiap umat muslim untuk berjuang dan berjihad fisisabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya.³ Kongres umat Islam ini menunjukkan bahwa seruan Resolusi Jihad yang dikeluarkan NU pada 22 Oktober memberikan Semangat perjuangan umat Islam untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Selain kongres Umat Islam di Yogyakarta respon terhadap seruan Resolusi Jihad NU juga dilakukan oleh umat Islam yang ada di bukit tinggi Sumatra yang melaksanakan mukhtamar pada 6-9 Desember 1945 yang juga menegaskan bahwa hukum mengusir musuh dari tanah air adalah fardu 'ain dan apabila meninggal maka dihukumi mati syahid.⁴ Dalam mukhtamar ini ditegaskan bahwa umat Islam harus sama-sama mempertahankan Negara Republik Indonesia dari para musuh yang mengusik kedaulatan negara Republik Indonesia.

Seruan *jihad fi sabilillah* dan pembahasan hukumnya pada mukhtamar Masyumi tanggal 6-9 Desember di Bukit Tinggi ini juga menghasilkan pembentukan laskar sabilillah. Berdasarkan pengkajaaian teks resolusi-resolusi NU tersebut seluruhnya dapat dikatakann merujuk pada fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Hal ini karena posisi KH. Hasyim Asy'ari yang saat itu

³Kedaulatan Rakyat 9 Nopember 1945

⁴Kedaulatan rakyat 19 Desember 1945

sebagai Rais Akbar jam'iyah NU dan sekaligus Rais Syuriyah Masyumi, yang memiliki kompetensi *ifta'* (menyampaikan fatwa).

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), kemerdekaan dan persatuan memang harus diperjuangkan. Sebagaimana yang telah difatwakan KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Fatwa tersebut diantaranya berbunyi: (1) Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah *fardu 'ain* bagi tiap-tiap orang islam yang mungkin meskipun bagi orang fakir. (2) Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid. (3) Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.

Menurut As'ad Said Ali sebagaimana dikutip Gugun el-Guyanie, fatwa tersebut menunjukkan bahwa posisi NU sesungguhnya sangat pro-kemerdekaan. Bukan hanya kemerdekaan semata yang diperjuangkan NU, namun juga kemerdekaan yang melahirkan suatu persatuan bangsa.⁵

Semangat Jihad yang dikobarkan oleh NU dalam bentuk Resolusi Jihad adalah semata-mata untuk mendukung tegaknya Negara Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Sehingga pekikan takbir "*Allahu Akbar*" yang mengobarkan semangat Juang, bukan ditunjukkan untuk merongrong kedaulatan NKRI dan Pancasila.⁶ Semangat Jihad ini berbeda dengan kelompok gerakan Islam lain yang

⁵Gugun el-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010),p.103.

⁶El-Guyanie, *Resolusi Jihad...*, p.104.

mengusung tema Jihad untuk mengganti pancasila dalam bingkai NKRI dengan negara Islam yang mengorbankan persatuan bangsa.

Fatwa KH. Hasyim Asy'ari tersebut sekaligus dengan jelas menampilkan cara berfikir *fiqih* yang matang. Menurutnya, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia adalah pemerintah yang sah sesuai syari'at, oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam. Usaha-usaha untuk merampas kemerdekaan ini adalah usaha yang harus dilawan menurut perintah Islam. Dari sinilah paham keagamaan *jihad fi sabilillah* untuk melawan kekuasaan penjajah sangat relevan untuk diterapkan.⁷

Sikap diatas merupak ekspresi dari pandangan keagamaan NU yang lebih mengedepankan substansi daripada formalitas. Dalam pandangan politik (*Fiqh Siyasi*) NU, berlakunya syari'at Islam lebih penting dibanding menampilkan simbol-simbol formalitas Islam. Bentuk negara, termasuk didalamnya mekanisme suksesi (*nasb al-imamah*) boleh bermacam-macam, tetapi yang paling penting adalah berlakunya nilai-nilai universal Islam dan mengandung jaminan kebebasan bagi umat Islam melaksanakan Ibadahnya.

⁷Muhibbin Zuhri "NU lahir dari kota" <http://nusurabaya.or.id/2016/10/21/kh-m-hasyim-asyari-fatwa-jihad-dan-perjuangan-kemerdekaan/> (diakses pada 15 September 2017)

B. Dampak terhadap kondisi sosial Surabaya

Nahdlatul Ulama adalah Organisasi islam yang didirikan pada tahun 1926 oleh para kyai pesantren. Organisasi ini dipimpin secara Nasional oleh KH. Hasyim Asy'ari dari Surabaya. Sejak itu kepemimpinan nasional NU dipegang oleh kiai dari Jombang selama beberapa waktu. Karena hubungan anatar kyai dan masyarakatnya sangat erat maka afiliasi masyarakat dengan NU bersifat *taken for granted*.⁸Dari hal tersebut, maka mayoritas masyarakat Islam atau santri di Surabaya pada waktu itu menjadi anggota atau bergabung dengan NU, dan hanya sedikit masyarakat yang masuk organisasi islam yang lain seperti Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi NU di Jombang atau Surabaya pada waktu itu sangat kuat.

Sebagai kota besar kedua setelah Jakarta, masyarakat Surabaya sangat heterogen. Di kota ini ada berbagai kelompok masyarakat sosial seperti priyai mapan, kaum intelektual-kritis, golongan Islam (baik tradisional atau modernis), kelompok sosialis-kiri, rakyat jelata dan lain sebagainya. Namun secara historis, Jawa Timur dan Surabaya menjadi basis paling kuat kaum Islam tradisional. Di wilayah ini dikenal sebagai kantong utama bagi pesantren-pesantren.⁹

Kondisi penduduk Surabaya semakin menuju kepada kesatuan semangat juang pada akhir bulan September dan Oktober 1945. Para pejuang kemerdekaan

⁸Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), p.40.

⁹Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.198.

memiliki kesamaan pandangan bahwa kemerdekaan yang baru saja diperoleh Indonesia mendapat ancaman kegagalan oleh pihak Belanda yang membongkang misi AFNEI Inggris. Kesamaan sikap ini membuat para pejuang di Surabaya berupaya melakukan cara apapun untuk menghilangkan ancaman itu meski akan berhadapan dengan Inggris yang secara militer sangat kuat.

Tewasnya Jendral Mallaby membuat Inggris melakukan perlawanan yang lebih besar terhadap para pejuang di Surabaya. Inggris menganggap Surabaya sebagai dalang tewasnya Mallaby dan menuntut tanggung jawab dari Surabaya. Inggris mengerahkan pasukannya pada 1 November 1945 dengan kekuatan 24.000 pasukan dari Divisi ke-5 dibawah pimpinan Mayjen EC. Mansergh dengan persenjataan meliputi 21 tank Sherman dan 24 Pesawat tempur yang didatangkan dari Jakarta.¹⁰

Setelah kedudukan mereka dianggap kuat, Mayjen EC. Mansergh pengganti Mallaby pada 9 November 1945 memberikan Ultimatum kepada Pemerintah RI daerah dan penduduk Surabaya. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi, dan petugas radio Surabaya untuk meletakkan senjatanya ditempat yang sudah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas.¹¹ Mereka harus melaporkan diri ke Bataviaweg (sekarang Jl. Jakarta) menjelang

¹⁰Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.225.

¹¹El-Guyanie, *Resolusi Jihad...*, p.87.

pukul 18.00 pada tanggal 9 November 1945. Mereka harus mendekat dengan berbaris satu persatu dengan senjata yang dimilikinya dan senjata itu harus diletakan dengan jarak 100 yard (91,4 meter dari pertemuan. Pasukan Inggris juga memaksa rakyat Surabaya untuk menandatangani dokumen yang berisi penyerahan tanpa syarat.¹²

Pada jam 20.00 malam, Gubernur Soeryo mengadakan kontak dengan pemerintah pusat di Jakarta untuk berkonsultasi mengenai ultimatum yang diberikan oleh Inggris. Laporan pemerintah Jawa Timur itu kemudian ditindak lanjuti oleh menteri luar negeri Mr. Ahmad Subarjo dengan menghubungi pihak pemimpin tertinggi tentara Inggris di Jakarta untuk menghindari pertempuran di Surabaya. Tidak lama setelah itu pada pukul 22.10 Mr. Ahmad Subarjo memberitahu pemerintahan Surabaya bahwa ia tidak berhasil merubah pendirian tentara Inggris dan mereka akan tetap menyerang apabila Surabaya tidak menyerah. Oleh karena itu MR. Ahmad Subarjo akhirnya menyerahkan sepebuhnya terkait ultimatum itu kepada pemerintahan Jawa Timur dan Surabaya.¹³

Setelah jelas bahwa pemerintahan RI pusat menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah RI daerah Jawa Timur di Surabaya. Maka gubernur Soeryo pada pukul 23.00 memberikan pidato di corong RRI yang memberikan semangat

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) daerah Jawa Timur* (1991). p. 117.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) daerah Jawa Timur* (1991). p.118-119.

kepada para pejuang Surabaya untuk berani menghadapi segala kemungkinan, dan menegaskan menolak ultimatum yang diberikan Inggris dan mengungkapkan lebih baik hancur daripada kita dijajah kembali.¹⁴ Pidato yang disampaikan gubernur Soeryo itu merupakan jawaban tegas dari pemerintah untuk menolak Ultimatum yang diberikan oleh Inggris.

Pidato yang disampaikan Gubernur Soeryo membangkitkan semangat perlawanan yang dilakukan oleh pejuang Surabaya. Semangat perlawanan itu muncul dari seorang pejuang dari badan perjuangan, bung Tomo yang selalu mengobarkan semangat melalui radio pemberontakan dengan semboyannya yang terkenal “selama banteng-banteng Indonesia masih berdarah merah, yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu tidak akan suka kita membawa bendera putih untuk menyerah kepada siapapun.

Menurut William H. Fredrik sebagaimana disebutkan oleh Zainul Milal dalam laskar ulama-santri dan Resolusi Jihad mengemukakan bahwa Bung Tomo (Sutomo) selain berhasil mengobarkan semangat perlawanan terhadap Inggris melalui pidatonya, ia juga disebut memiliki hubungan khusus dengan kelompok Islam. Ia juga mendapatkan kepercayaan dari KH. Wahid Hasyim dan sering meminta nasihat kepada para kyai untuk mendapatkan pesan-pesan yang kemudian dijadikan untuk bahan pidatonya. Dan dari beberapa kyai yang ia mintai nasihat

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) daerah Jawa Timur* (1991). p.119.

yang diberikan oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar NU seringkali digunakan untuk menggelorakan semangat perlawanan kepada musuh melalui radio pemberontakan.¹⁵ Ini mengindikasikan pertempuran 10 November yang digaungkan oleh bung Tomo tidak lepas kaitannya dengan sosok KH. Hasyim Asy'ari atau juga fatwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan NU.

Seruan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU dinilai sebagian elit pemimpin negara di Jakarta sebagai suatu hal yang mengada-ada, namun sehari sesudah resolusi jihad diserukan, sepanjang hari sejak pagi tanggal 24 Oktober 1945 bung Tomo melalui pidatonya menyampaikan pesan kepada arek-arek Surabaya agar jangan berkompromi dengan sekutu yang akan mendarat di Surabaya. Sebagai wartawan, bung Tomo sudah mendapati informasi bahwa pasukan sekutu akan mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945, sehingga tanggal 24 Oktober pagi, bung Tomo sudah berpidato mengobarkan semangat rakyat Surabaya.¹⁶ Dengan isi pidatonya sebagai berikut:

“kita ektrimis dan rakyat, sekarang tidak percaya lagi pada ucapan-ucapan manis. Kita tidak percaya setiap gerakan (yang mereka lakukan) selama kemerdekaan Republik tetap tidak diakui! Kita akan menembak, kita akan mengalirkan darah siapapun yang merintang jalan kita! Kalau kita tidak diberikan kemerdekaan sepenuhnya, kita akan menghancurkan gedung-gedung dan pabrik-

¹⁵Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.226-227.

¹⁶AgusSunnyoto, “Resolusi Jihad NU” <http://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya->. (diakses pada 14 maret 2017)

pabrik imperialis dengan granat tangan dan dinamit yang kita miliki, dan kita akan memberikan tanda revolusi, merobek setiap makhluk hidup yang berusaha menjajah kita kembali!”

Resolusi Jihad kemudian tersebar luas dikumandangkan oleh Bung Tomo dengan mengucapkan takbir *Allahu Akbar* melalui radio pemberontakan maupun ketika memberikan wejangan kepada para pejuang di Markas Kyai Blauran. Para kyai dan utusannya terus membanjiri Surabaya dengan mendirikan markas di rumah KH. Yasin di Blauran Gang IV/24 Surabaya sehingga dikenal dengan sebutan markas Kyai.¹⁷ Dalam pidato bung Tomo pada sore hari tanggal 9 November 1945, ia terus mendorong semangat bertempur melawan musuh diantaranya berbunyi;

“Slogan kita tetap sama: merdeka atau mati. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa kemenangan akan ada di pihak kita, karena tuhan ada di sisi yang benar. Percayalah saudara-saudara, bahwa tuhan akan melindungi kita semua. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!”¹⁸ Resolusi Jihad yang diserukan oleh NU memberikan dampak sosial masyarakat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Inggris dan juga Belanda yang ingin menghalangi kemerdekaan Indonesia.

¹⁷Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad, Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agma hingga Negara* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), p.179.

¹⁸Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.227.

Pertempuran hebat 10 November pun tidak terelakan. Mayjen Mansergh memerintahkan seluruh angkatan perang Inggris yang ada di Surabaya untuk menyerang kota Surabaya. Pukul 09.00 tentara Inggris sudah mulai masuk kota Surabaya dan sekitar pukul 10.00 Inggris mulai menyerang dengan tembakan-tembakan dari laut.¹⁹

Bila ditinjau dari kronologi kesejarahan, pertempuran Surabaya pada dasarnya ialah selanjutan dari peristiwa perang rakyat empat hari pada 26-27 dan 28-29 Oktober 1945, yaitu sebuah perang kota antara Brigade ke-49 Mahratta di bawah komando Brigadir Jenderal Aulbertin walter Sothern Mallaby dengan arek-arek Surabaya yang berlangsung sengit dengan kesudahan ssekitar 2300 orang meninggal termasuk Jenderal Mallaby. Pertempuran itu terjadi akibat adanya seruan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh NU pada 22 Oktober 1945.²⁰

Seruan Resolusi Jihad terbukti telah membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia sebagai negeri jajahannya. Dari hal itu, kondisi Surabaya menjadi basis perjuangan rakyat untuk melawan penjajah dengan semangat jihad yang digaungkan NU.

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) daerah jawa Timur* (1991). p.120.

²⁰AgusSunyoto, "Resolusi Jihad NU" <http://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya->. (diaksespada 14 maret 2017)

C. Dampak terhadap internal NU

Selain berdampak kepada kondisi sosial masyarakat Surabaya yang kemudian memunculkan berbagai aksi perlawanan terhadap tentara Inggris dan Belanda, Resolusi Jihad yang digagas KH. Hasyim Asy'ari juga berdampak pada Jam'iyah Organisasi NU sendiri.

Pengaruh Resolusi Jihad terhadap NU itu bisa dilihat dari putusan kongres Umat Islam di Yogyakarta yang memutuskan Masyumi sebagai Partai Politik dan menempatkan KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Syuriyah partai Masyumi itu. Hal ini menandakan kepercayaan kepada KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar NU yang memiliki otoritas fatwa dalam Organisasi Masyumi tersebut.²¹

Pada kongres itu nama Masyumi disetujui dibandingkan dengan nama Partai Rakyat Islam karena pada masa itu nama masyumi lebih dikenal. Adapun keputusan penting dalam kongres itu ialah terkait dengan mengarahnya pertempuran antara kesatuan pejuang republik dengan tentara Inggris. Maka dalam kongres itu juga dikeluarkan Resolusi Perang Sabil sebagai bentuk untuk melawan semua bentuk imperialisme.²²

Kedatangan Jepang ke Indonesia jelas tidak menguntungkan bagi organisasi-organisasi keagamaan. Hal ini terjadi karena Jepang tidak memberikan keluasaan dan kebebasan bagi keagamaan. Jepang selalu melakukan pembatasan-pembatasan ketat dan mengontrol terhadap segala aktifitas keagamaan

²¹Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.182.

²²Bizawie, *Laskar ulama-santri...*, p.222.

Islam. Kondisi seperti itu menyebabkan pelaksanaan keyakinan keagamaan Islam terkendala. Pelaksanaa ajaran Islam yang dilakukan di berbagai pesantren mengalami kesulitan dan selalu dipaksa untuk selalu tunduk kepada militer Jepang.

Meski demikian, para ulama Islam dan juga ulama NU menganggap bahwa Jepang masih lebih baik dari Belanda karena Jepang mau melibatkan para pemimpin Indonesia untuk ikut mengatur persoalan Negara. Sistem militerisme totaliter yang diterapkan Jepang ternyata masih membuka peluang bagi perundingan dengan para tokoh agama maupun kebangsaan.²³

Menyikapi hal ini NU membuka ruang negosiasi dan kolaborasi dengan Jepang dan melakukan Ijtihad Politik dengan menerapkan politik *Yahannu* (siasat berpura-pura demi kebaikan). Sikap kerjasama dan bergantung pada Jepang itu bukan lantas membuat NU bisa dibeli atau dikendalikan oleh Jepang, akan tetapi itu adalah taktik dalam menghadapi lawan.

Ketika Jepang meminta *Jawa Hokokai* untuk mengumpulkan pemuda untuk dilatih menjadi HEIHI (Prajurit pembantu Pasukan Jepang) dan sebagian menjadi PETA (Pembela Tanah Air), KH. Wahid Hasyim juga meminta kepada Jepang untuk melatih para santri di pesantren. Tentara santri itu dinamai oleh KH. Wahid Hasyim “hizbullah” dan “sabilillah”. Para santri dari berbagai pesantren itu

²³Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.185-186.

kemudian dilatih selama 6 bulan di Cibarusa, Jawa Barat, dibawah bimbingan Kapten Yanagawa yang sebelumnya juga melatih PETA.²⁴

Laskar rakyat yang penting dan terkuat pada waktu itu ada tiga jenis. *Pertama*, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dibentuk dan dekat dengan Amir Syarifudin, seorang Menteri Pertahanan. *Kedua*, Barisan Banteng dan Barisan pelopor, yang erat hubungannya dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). *Ketiga*, Hizbullah (laskar santri) dan Sabilillah (laskar kyai/ulama), yang mempunyai kedekatan dengan Masyumi (majelis Syuro Muslim Indonesia).²⁵

Markas tinggi Hizbullah berkedudukan di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin (konsul NU) Jakarta. Para anggotanya diambil dari Muhammadiyah, NU dan organisasi Islam lain yang bernaung di bawah bendera Masyumi. Sedangkan kaum Ulama atau kyainya memasuki barisan Sabilillah yang dibentuk setelah Hizbullah. Markas Sabilillah berada di Malang, Jawa Timur yang dipimpin KH. Masykur (Konsul NU Malang). Kantor Pusat Sabilillah berada di Malang karena disesuaikan dengan Kondisi dan situasi Surabaya menjelang perang 10 Nopember 1945 yang membutuhkan bantuan perjuangan.

Laskar Hizbullah dan Sabilillah kemudian ditingkatkan peranannya sebagai tentara profesional, ketika Masyumi menjadi partai politik Islam Indonesia dalam kongresnya di Yogyakarta, 7-8 Nopember 1945. Dan dikukuhkan lagi pada

²⁴Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.189.

²⁵El-Guyanie, *Resolusi Jihad...*, p.40.

Mukhtamar partai Masyumi pada 10-13 Februari 1946. Mukhtamar itu memutuskan untuk memperkuat pertahanan dan ketentaraan Indonesia dengan mendirikan markas-markas daerah (markas devisi) di seluruh Indonesia. Kemudian tersusun Anggaran Dasar barisan Hizbullah dan Sabilillah, yang antara lain didalamnya tercantum tujuan dibentuknya tentara sabil tersebut yaitu: untuk menegakkan Agama Islam dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.²⁶

Penguatan tentara Hizbullah dan Sabilillah itu sebagai dampak dari seruan Resolusi Jihad yang digagas KH. Hasyim Asy'ari selaku Pemimpin tinggi Nahdlatul Ulama dan Juga Partai Masyumi. Resolusi Jihad secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap gerakan hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh kyai dan santri NU untuk bersama-sama dalam menjaga Negara dan menentang segala bentuk penjajahan yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Jihad NU tidak untuk memaksakan formalisasi Syari'at Islam yang mengorbankan persatuan bangsa.

Sikap NU tentang pancasila ini dapat kita lihat dari Mukhtamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 yang menghasilkan keputusan tentang hubungan NU dan Pancasila. Berikut adalah keputusannya:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam.

²⁶Bustami, *Resolusi Jihad...*, p.191.

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap diatas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

*Musyawahar Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama
Soekorejo, Situbondo 16 Rabi'ul Awwal 1404 H(21 Desember 1983)²⁷*

²⁷ Tim MKNU, *Nahdhatul Ulama dan Negara*, (Jakarta: Madrasah Kader Nahdhatul Ulama/Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2017), p.9.